

JALAN BARU

NAPI

TERORIS



Dr. Sholihul Huda, SHI, M.Fil.I

Prolog Kajian: Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

JALAN BARU NAPI TERORIS

Dr. Sholihul Huda, SHI, M.Fil.I



JALAN BARU NAPI TERORIS

© Dr. Sholihul Huda, SHI, M.Fil.I

xii + 148 halaman; 15,5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-830-5

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2024

Penulis : Dr. Sholihul Huda, SHI, M.Fil.I

Editor : Moh. Hambal Shafwan
Warsidi

Sampul : Taufiq

Layout : Taufiq

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Wonocatur Gg. Gayam No. 402 RT. 08/RW. 25

Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta 55198

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

Pengantar Penerbit

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku yang berjudul *Jalan Baru Napi Teroris: Pembaharuan Pola Deradikalisasi di Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan* akhirnya dapat sampai ke tangan pembaca dengan baik.

Karya ini membahas tentang fenomena gerakan radikalisme yang masih menjadi hantu peradaban dunia termasuk di Indonesia. Sebaran ideologi dan aksi radikalisme oleh kelompok dan jaringan teroris masih terus bergerak dan masih berbahaya di tengah masyarakat. Sehingga, kita masih perlu terus waspada dan mencari pola pencegahan (deradikalisasi) terorisme yang strategis dan efektif dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan agar tidak terjadi dendam bagi keluarga jaringan teroris.

Pola tersebut diterapkan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang berpusat di Desa Tenggulun Solokuro Lamongan yang efektif dan strategis dalam melakukan kerja-kerja deradikalisasi terutama kepada para mantan kombatan dan napi teroris (Napiter). Maka dari latar tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut pola perlawanan terhadap radikalisme dari desa (Tenggulun).

Jalan Panjang Mengkonter Radikalisme: Dari Deradikalisasi ke Moderasi

Sebagian isi tulisan yang menjadi kata pengantar buku ini sejatinya pernah dimuat dalam opini *Kompas.id* pada tanggal 11 Februari 2021. Dengan ruang yang lebih luas, isi tulisan di *Kompas.id* kemudian dikembangkan sesuai konteks masa kini. Harus diakui bahwa moderasi dalam beragama (*wasathiyah*) merupakan terma yang paling banyak diperbincangkan hingga hari ini. Moderasi beragama dipandang sebagai salah satu ikhtiar terbaik untuk mengkonter radikalisme dalam berbagai bentuknya. Terutama sekali adalah radikalisme bernuansa keagamaan yang dalam beberapa dekade terjadi di tanah air.

Kini hampir semua kampus, negeri dan swasta atau kampus umum dan berbasis keagamaan, yang menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas. Bahkan, kampus-kampus di bawah pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag) telah menjadikan program moderasi beragama sebagai “ikon”. Seperangkat daya dukung diadakan untuk menopang program moderasi. Rasanya sudah tidak terhitung kampus di bawah Kemenag yang membentuk Pusat Studi Moderasi Beragama. Nomenklaturnya tentu bisa beragam untuk setiap kampus, namun substansinya tetap sama.

Sumber daya kampus pun disiapkan sedemikian rupa, mulai kelembagaan, instruktur dan anggaran, disiapkan untuk menggelorakan program moderasi beragama. Bukan hanya dunia kampus, moderasi

beragama juga telah menjadi program lintas kementerian di pemerintahan. Demikian juga dengan TNI dan POLRI sebagai dua institusi penting penjaga keamanan negeri juga menjadikan moderasi beragama sebagai *concern* dari level pusat hingga pelosok. Semua itu menunjukkan adanya kesadaran internal untuk mengganti pendekatan dalam mengkonter radikalisme, yakni dari deradikalisasi ke moderasi.

Tatkala bersilaturahmi ke Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada 30 Januari 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan komitmennya untuk menggunakan pendekatan moderasi dalam penanggulangan intoleransi, ekstremisme, dan terorisme. “Moderasi beragama merupakan salah satu formula untuk menekan paham-paham radikal dan intoleransi dengan cara *soft approach*. Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat *hard* (keras),” tegas Kapolri kala itu.

Komitmen Kapolri tentu sangat melegakan bagi PP Muhammadiyah yang menjadi tuan rumah kegiatan silaturahmi. Apalagi sejak lama PP Muhammadiyah melalui pandangan tokoh-tokohnya selalu menekankan pentingnya pendekatan moderasi daripada deradikalisasi. Moderasi beragama dinilai lebih *soft* dan manusiawi karena menekankan pentingnya jalan dialog. Sementara program deradikalisasi dinilai lebih mengutamakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan. Dampaknya, program deradikalisasi sering menghadirkan ketakutan, stigma negatif, dan perasaan traumatik bagi keluarga terduga teroris.

Dari Deradikalisasi ke Moderasi

Tatkala mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memasukkan kebijakan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024). Kemenag juga menerbitkan buku *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (2019). Karya yang dikemas layaknya buku saku ini berisi soal-jawab seputar moderasi beragama. Karena itu, dapat dikatakan bahwa program moderasi beragama yang kini bergulir sejatinya warisan

(*legacy*) berharga Kemenag periode 2014-2019. Kemenag periode Fachrul Razi (2019-2020) dan Yaqut Cholil Qoumas (2020-2024) secara konsisten juga menjadikan moderasi beragama sebagai perhatian utama.

Seiring dengan menguatkan jalan moderasi sebagai alternatif untuk mengkonter radikalisme dan terorisme, kritik dari berbagai kalangan terhadap program deradikalisasi semakin nyaring terdengar. Dalam media resmi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), deradikalisasi dimaknai sebagai usaha untuk mengubah ideologi, pemikiran, pemahaman, sikap, dan tindakan seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal. Strategi yang digunakan adalah melalui reedukasi, resosialisasi, dan penanaman nilai-nilai multikulturalisme.

Meski secara konseptual baik, namun dalam banyak kasus penanganan radikalisme dan terorisme, aparat keamanan seringkali menggunakan pendekatan kekuasaan dan kekerasan. Ironinya tindakan kekerasan terhadap terduga teroris sering dilakukan aparat keamanan di depan keluarganya. Perlakuan ini pasti menghadirkan trauma mendalam, bahkan sangat mungkin dendam kesumat dari keluarga terduga teroris. Implementasi program deradikalisasi pun terkesan abai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada konteks itulah pendekatan moderasi beragama penting dijadikan alternatif. Pendekatan moderasi dinilai lebih manusiawi karena tidak memosisikan sasaran program terstigma radikal, teroris, dan ekstremis. Dalam implementasinya moderasi beragama juga mengedepankan jalan dialog. Dengan cara ini penanggulangan terorisme diharapkan tidak kontra produktif, bahkan melahirkan radikalisme baru. Apalagi faktanya program deradikalisasi belum mampu menyelesaikan problem radikalisme secara mendasar dan komprehensif. Yang terjadi justru adanya peningkatan kasus radikalisme dalam berbagai ekspresinya.

Jika menengok ke belakang, pemerintah pada awalnya memang memilih pendekatan *Empowering the Moderates* untuk melakukan kontraterorisme. Negeri Jiran Malaysia juga membentuk gerakan

bernama *Movement of the Moderates*. Strategi yang sama juga dipilih Pakistan dengan menggunakan terminologi *Enlightening the Moderates*. Meski menggunakan terminologi berbeda, namun substansinya sama-sama menekankan pentingnya moderasi. Sementara itu, negara-negara Barat mengajukan program *Countering Violent Extremism*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih diksi *Prevention of Violent Extremism*.

Strategi negara-negara Barat itulah yang tampaknya mengilhami BNPT untuk memilih program deradikalisasi. Persoalannya, program deradikalisasi berpotensi untuk memosisikan sasaran kegiatan sebagai orang atau kelompok yang terpapar paham radikal. Stigma ini jelas tidak menguntungkan bagi mereka yang mengikuti program deradikalisasi. Karena itulah kiritik terhadap program deradikalisasi terus disuarakan berbagai kelompok. Harapannya, ada perubahan pendekatan penanganan radikalisme dari deradikalisasi ke moderasi.

Seiring dengan tantangan keagamaan era kontemporer, dorongan untuk menjadikan moderasi sebagai alternatif mengkonter radikalisme atau ekstremisme terus menguat. Dalam konteks kajian Islam, konsep moderasi dikaitkan dengan *wasathiyah*. Hashim Kamali dalam *The Middle Path of Moderation in Islam* (2015), menyebut konsep *wasathiyah* dalam al-Qur'an sebagai spirit moderasi dalam beragama, baik berkaitan dengan pemikiran, sikap, dan perbuatan. *Wasathiyah* Islam juga lazim digunakan di negara-negara minoritas Muslim untuk menyebut posisi pertengahan diantara dua ekstremitas.

Secara terminologi moderasi berarti jalan tengah (*middle path*), sesuatu yang ada di tengah dari dua sifat buruk. Dapat dicontohkan, sifat berani dipandang baik karena berada diantara karakter ceroboh dan takut. Demikian juga sifat dermawan merupakan akhlak terpuji karena berada diantara karakter boros dan kikir. Dalam konteks praktik keagamaan, moderasi bermakna pemikiran, sikap, dan perilaku beragama dengan cara mengambil posisi pertengahan (*wasathiyah*). John L Esposito dalam *What Everyone Needs to Know About Islam* (2011), menipologikan Muslim moderat dengan karakter progresif atau liberal.

Muslim moderat dibedakan dari Muslim konservatif, tradisional, dan fundamentalis.

Diantara ulama yang memberikan perhatian pada persoalan moderasi beragama adalah Ibnu Taimiyah. Ia menulis karya *Al-'Aqidah Al-Wasithiyyah (The Creed of Al-Wasithiyyah)*. Ibnu Taimiyah menggambarkan aqidah atau teologi tengahan sebagai paham yang dianut kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Menurut Ibn Taimiyah, kelompok Ahl al-Sunnah wa al-Jami'ah ini memiliki sifat *al-Najiyah* (yang selamat) dan *al-Manshurah* (yang memperoleh pertolongan).

Berbagai pandangan itu menegaskan bahwa moderasi beragama dapat menjadikan pemeluknya terhindar dari sikap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agama. Al-Qur'an secara tegas melarang sikap berlebih-lebihan atau ekstrem dalam beragama (QS. *Al-Nisa'*: 171 dan *al-Maidah*: 77). Nabi Muhammad Saw juga bersabda: "Jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan (*ghuluw*) dalam beragama, karena sesungguhnya sikap *ghuluw* telah membinasakan orang-orang sebelum kalian." (HR. An-Nasai dan Ibn Majah).

Tantangan Moderasi

Harus diakui, penyemaian nilai-nilai moderasi beragama kini mulai menghadapi tantangan. Sebagian pihak mencurigai program moderasi beragama sebagai bentuk pendangkalan akidah umat. Apalagi secara demonstratif, publik acapkali menyaksikan kelompok-kelompok keagamaan tertentu menunjukkan praktik sinkretisme melalui ritual lintas agama di gereja dan tempat ibadah lainnya. Sebagian lagi memahami moderasi beragama layaknya ideologi sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Mereka umumnya menyebut tiga ideologi itu dengan "Sipilis". Sebutan "Sipilis" mengandung pesan agar umat memosisikan ideologi sekularisme, pluralisme, dan liberalisme layaknya penyakit berbahaya.

Padahal, secara akademik tiga ideologi ini bermakna jamak. Nurcholis Madjid (Cak Nur), misalnya, memaknai sekularisme dalam perspektif lebih sosiologis. Sekularisme tidak semata bermakna pemisahan

urusan akhirat (*sacred*) dan dunia (*profan*). Bagi Cak Nur, sekularisme merupakan paham yang mengajarkan pentingnya membedakan urusan akhirat (*sacred*) dan dunia (*profan*). Pilihan kata “membedakan” tentu sangat penting karena tidak sama dengan “memisahkan”. Dengan kerangka pikir ini, Cak Nur melontarkan pernyataan: *Islam Yes, Partai Islam No!* Pernyataan Cak Nur merupakan hasil amatan sosiologis yang menggambarkan performa elit partai Islam. Mereka hanya menjadikan Islam sebagai simbol perjuangan politik. Faktanya, perilaku politiknya masih jauh dari nilai-nilai moral keislaman.

Kata pluralisme juga sering diartikan paham yang mengajarkan semua agama sama dan benar. Bahkan, ada yang menyamakan pluralisme dengan relativisme dan nihilisme. Pemahaman ini berbeda dengan Diana L. Eck dalam *What is Pluralism* (1993). Buku ini menegaskan bahwa pluralisme berbeda dengan relativisme dan toleransi pasif. Pluralisme adalah pencarian yang aktif untuk memahami perbedaan. Pluralisme juga menekankan pentingnya dialog yang tulus dan nir-kekerasan sehingga menghadirkan komitmen untuk berbagi pengalaman, saling mengkritik, dan bersedia dikritik.

Sementara itu, liberalisme oleh para pengkritiknya dimaknai paham yang mengagungkan kebenaran akal dan mengabaikan wahyu. Padahal, liberalisme dalam pengertian yang lebih generik merupakan paham yang mengajarkan pentingnya penggunaan akal dalam memahami ajaran agama. Pemaknaan ini terasa realistik karena sejatinya tidak ada aliran dalam tradisi keagamaan apa pun yang tidak menggunakan akal dalam memahami ajaran agama. Yang membedakan adalah kadar penggunaan akal dalam memahami wahyu.

Ada mazhab keagamaan yang sangat menonjol dalam penggunaan akal, sehingga digolongkan liberalisme sejati (ekstrem kiri). Sebaliknya, ada aliran keagamaan yang sedikit sekali menggunakan akal. Mereka dinamakan tekstualis atau literalis (ekstrem kanan). Di tengah pergumulan dua aliran yang sama-sama ekstrem itulah lahir mazhab tengahan (moderat, *wasathiyah*). Aliran ini menggunakan akal secara proporsional dalam memahami ajaran agama. Posisi tengahan

(*wasathiyah*) penting untuk menjauhkan umat dari ekstremisme dalam beragama.

Pentingnya Moderasi

Berdasarkan beberapa pandangan dari para pemikir dan landasan teologis-normatif tersebut di atas kiranya kita sampai pada kesimpulan bahwa moderasi beragama penting dikedepankan dalam kehidupan keagamaan di negeri tercinta. Moderasi dipandang sebagai strategi jitu untuk melawan radikalisme sekaligus mewujudkan peradaban global. Dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama penting sebagai pendekatan untuk mengkonter radikalisme sekaligus mengajak kelompok-kelompok keagamaan yang berkarakter radikal bergerak ke posisi tengah (*middle position*).

Posisi tengah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak merupakan substansi ajaran moderasi beragama. Tatkala musim pandemi lalu, nilai-nilai moderasi beragama sudah dipraktikkan sebagian kalangan dengan sangat baik. Salah satu bentuknya adalah sikap kehati-hatian atau kewaspadaan. Di tengah pandemi umat diajarkan beribadah di rumah bersama keluarga, bermasker, menjaga jarak fisik, dan mengikuti program vaksinasi. Selama pandemi umat juga mempraktikkan ajaran agama tentang tolong-menolong antar sesama (*ta'awun* sosial). Berderma merupakan praktik moderasi beragama karena berada di antara dua ekstremitas: boros dan bakhil.

Para pengkritik moderasi beragama penting memahami bahwa yang dimoderasi sejatinya bukan agamanya. Hal itu karena agama bersumber dari wahyu, yang tidak mungkin diperluas atau dipersempit. Yang dimoderasi adalah pemahaman atau penafsiran umat terhadap ajaran agama untuk diselaraskan dengan tantangan zaman. Pada konteks inilah nilai-nilai moderasi penting terus disemai agar pada saatnya umat menampilkan wajah beragama yang lebih ramah terhadap keragaman, bukan wajah yang penuh amarah.

Akhirnya, saya ucapkan selamat pada Mas Sholihul Huda. Buku terbaru dengan judul provokatif: “Jalan Baru Teroris”, sungguh sangat

menggoda. Saya *haqqul yaqin*, isinya pasti sangat menarik untuk dibaca. Apalagi buku ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan didukung data yang memadai. Karena itu, jangan lewatkan membaca buku ini. Semoga buku ini menjadi amal jariyah bagi penulisnya. Amal jariyah yang dijamin terus mengalir pahalanya. Amin.

Prof. Dr. Biyanto, M.Ag

Guru Besar UIN Sunan Ampel dan

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Daftar Isi

Prakata	v
Pengantar Penerbit.....	ix
Jalan Panjang Mengkonter Radikalisme: Dari Deradikalisasi ke Moderasi	xi
Daftar Isi	xix
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Kegelisahan Akademik.....	1
B. Kebaruan Buku	8
C. Bagaimana Buku Ini Ditulis?	10
D. Sistematika Buku	15
BAB 2 Radikalisme-Terrorisme: Ideologi dan Aksi Maut di Indonesia.....	17
A. Radikalisme Agama: Ideologi Maut Atas Nama Tuhan ..	17
B. Terorisme: Aksi Maut Atas Nama Tuhan.....	24
C. Deradikalisasi: Strategi Efektif Melawan Radikalisme .	33
BAB 3 Moderasi Beragama: Jalan Keluar dari Radikalisme di Indonesia	39
A. Gagasan Moderasi Beragama	39
B. Karakteristik Moderasi Agama.....	45

C.	Moderasi Agama: Jalan Alternatif Melawan Radikalisme ..	48
D.	Masa Depan Moderasi Beragama: Tantangan dan Harapan	52
BAB 4	Lingkar Perdamaian: Gerakan Melawan Radikalisme dari Desa.....	59
A.	Tenggulun: Kampung Teroris Menjadi Moderat.....	59
B.	Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP): Profil Gerakan Melawan Radikalisme dari Desa.....	69
C.	Lingkar Perdamaian: Jalan Baru Bagi Napiter.....	75
BAB 5	Praksis Deradikalisasi Melalui Edukasi Moderasi di Lingkar Perdamaian.....	103
A.	Edukasi Moderasi: Dasar Deradikalisasi.....	103
B.	Edukasi Moderasi: Pola Efektif Melawan Radikalisme di Yayasan Lingkar Perdamaian.....	106
C.	Memperkuat Moderasi Beragama: Modal Menuju Indonesia Emas.....	124
BAB 6	Kesimpulan	127
	Glosarium	129
	Daftar Pustaka.....	131
	Dokumentasi Kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP).....	141
	Profil Penulis.....	147

Dokumentasi Kegiatan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP)













YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN

*Alamat : Jl. Masjid Baitul Muttaqin No. 01 Rt: 08/03 Tenggulun
Solokuro Lamongan JATIM 62265. Telp. 081357511111,
085330996676 email lingkarperdamaian@yahoo.com*

STRUKTUR YAYASAN LINGKAR PERDAMAIAN

PELINDUNG

Brigjend Pol Surya Dharma Salim
(Mantan Kadensus 88 Anti Teror)

PENASEHAT

Kapolres Lamongan
Prof. Dr. Achmad Habib
Dr. H. Hambal Sofwan, Lc, M.Pd.I

Yusuf Anis

KETUA 1

Dr. H. Ali Fauzi, M.Pd.I

KETUA 2

H. Iswanto, M.Pd.I

BENDAHARA

H. Sumarno, S.Pd.I

SEKRETARIS

Faqih Luqman, M.Pd.

PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Yoyok Edi Sucahyo. SE.
Muhammad In'am Amin, SE

SARPRAS

Saiful Arif
Muhammad Muzayyin

ADMINISTRASI

Nur Kholidah, S.Pd.I

Profil Penulis



Dr. Sholihul Huda, SHI, M.Fil.I bin H. Atrup, biasa dipanggil Gus Sholikh. Lahir di Lamongan, 29 Juni 1981, dari pasangan H. Atrup dan Hj. Rasmo'ah. Menikah dengan Maulida Puji Ayu K, Amd.Keb.

Dikaruniaai seorang putri bernama Galena Hayfa Nadda Ignacia sedang mengumpulkan ilmu di Madrasah Mua'limat Muhammadiyah Yogyakarta.

Kosentrasi ilmu Studi Agama, Filsafat Islam, Sosiologi Agama, Politik Islam. Dosen tetap FAI Umsurabaya dan Dosen Muhammadiyah Studies (AIK) Pascasarjana Umsurabaya.

Mengenyam pendidikan di SDN Moropelang Babat-Lamongan (1994), MI Muhammadiyah Moropelang Babat-Lamongan (1994). MTs YTP Kertosono-Nganjuk (1997). MA Luqmanul Hakim Batumarta OKU-Palembang (2000). S1 Politik Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya (2006). S2 Filsafat Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2014). S3 Filsafat Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2020). Nyantri di Pesantren *Ar-Roudlatul Ilmiyah* (YTP) Kertosono-Nganjuk dan Pesantren *Luqmanul Hakim* OKU-Palembang.

Organisasi akademik, Pimpinan Redaksi JURNAL AL-HIKMAH Prodi Studi Agama-Agama Umsurabaya (2016-2018). Ketua Lembaga Kajian Agama Budaya (LKAB) FAI Umsurabaya (2018-2021). Ketua Lembaga Pengkajian Al-Islam KeMuhammadiyah (LPAIK) UMSurabaya (2017-

2021). Pengurus Pusat Asosiasi Studi Agama Indonesia (ASAI) (2024-2029). Pengurus Pusat Asosiasi Program Pascasarjana PTMA/APPTMA (2019- 2025). Direktur Riset P3MI Pascasarjana Umsurabaya (2021-2025). Sekretaris Direktur Program Pascasarjana Umsurabaya (2021-2025). Tim Pengembang Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah (2024-2026). Direktur InSID for *Research and Humanity*.

Organisasi masyarakat, Ketua OSIS MA Luqmanul Hakim Palembang (1999). Ketua Umum KORKOM IMM IAIN Sunan Ampel Surabaya (2003). Ketua Bidang Hikmah PC IMM Kota Surabaya (2004). Ketua Bidang Hikmah DPD IMM Jawa Timur (2006). Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur (2010). Wakil Sekretaris MEK Muhammadiyah Jawa Timur (2015). Ketua RT 33 Grand Masangan (2018). Sekretaris Umum DPD KNPI Provinsi Jawa Timur (2017-2019). Tim Seleksi KPU Zona IV Jawa Timur (2019). Panelis PILKADA Kab. Kediri-Kab. Lamongan, Kab. Bayuwangi, Kab. Mojokerto, Kota Blitar (2020). Sekretaris Korwil FOKAL IMM Jawa Timur (2017-2022). Wakil Sekretaris Karang Taruna Jawa Timur (2022-2027). Wakil Ketua Baitul Muslimin (BAMUSI) Jawa Timur (2021-2025). Wakil Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah Jawa Timur (2022-2027). Ketua Ranting Muhammadiyah Masangan Wetan Sukodono Sidoarjo (2023-2028).

Karya Buku, *Pendidikan Agama Islam Karakter Toleransi*, (2016). *The Clash of Ideologi Muhammadiyah: Pertarungan Ideologi: Moderat Versus Radikal*” (2017). *Manifesto Anti Kekerasan Agama Kaum Muda Indonesia*, (2018). *Inclusive Village In Indonesia*, (2019). *Resolusi Konflik Keagamaan: Model GP Ansor NU-Pemuda Muhammadiyah Paciran Lamongan*, (2020). *Dakwah Digital: Pola Baru Dakwah Muhammadiyah Era Disrupsi* (2022). *Moderasi Keagamaan Berbasis Kearifan Lokal: Dari Balun Menuju Indonesia Berkedamaian* (2022). *Dasar-Dasar Filsafat: Sebagai Pengantar* (2023), *Konversi Agama: Dialektika Wacana Kebebasan Beragama di Muhamamdiyah* (2024). Kontak penulis, email; sholikhsby@gmail.com.